
**PENGARUH PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI
KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM**

Ni Komang Putri Handayani¹

Ni Nyoman Ayu Suryandari²

Gde Bagus Brahma Putra³

Universitas Mahasaraswati Denpasar

komangputrihandayani17@gmail.com

Abstract

Good Corporate Governance (GCG) is a corporate governance system that functions as a control tool to regulate the structure and mechanisms within the company so as to improve company efficiency and performance. Proxies used in measuring GCG are GCG principles consisting of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. The number of samples used was 145 respondents taken from each LPD located in Rendang District, Karangasem Regency. The types of data used in this study are quantitative and qualitative data. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using SPSS. Data sources used in this study are primary and secondary data. Based on the results of hypothesis testing, it is known that the principles of Good Corporate Governance: transparency has no effect on LPD performance while accountability, responsibility, independence, and reasonableness have a positive effect on LPD performance.

Keywords: LPD Performance and Good Corporate Governance Principles.

1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi daerah salah satunya perbankan. Selain perbankan, di Provinsi Bali terdapat lembaga keuangan mikro, yaitu LPD yang terdapat di masing-masing desa adat. LPD juga berperan dalam pembangunan perekonomian daerah. LPD di Bali adalah lembaga milik desa adat yang berfungsi sebagai wadah kekayaan desa adat yang melaksanakan fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan di Bali. Kaidah-kaidah manajemen yang digunakan LPD lebih sederhana dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat didirikannya.

Penelitian ini khusus membahas tentang LPD di Kecamatan Rendang, yang terdiri dari 26 LPD terdapat 5 LPD yang tidak aktif, namun SK Gubernur LPD tersebut belum dicabut jadi masih terdaftar di Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Karangasem. Penyebab 5 LPD tersebut tidak aktif adalah karena pengelolaan LPD tidak baik sehingga LPD mengalami kebangkrutan dan

mengalami krisis kepercayaan. Salah satu faktornya yaitu pengurus LPD tidak profesional, seperti memberikan pinjaman ke keluarga pengurus tanpa survei dari petugas LPD yang bisa menyebabkan kredit macet atau bisa juga karena kenakalan pengurus LPD. Oleh karena hal tersebut dapat diasumsikan bahwa teori agensi tidak maksimal bisa diterapkan di LPD tersebut, untuk meminimalisir kejadian tersebut terulang kembali di LPD yang lainnya maka penelitian ini penting dilakukan.

Menurut Shil (2008), konflik keagenan muncul ketika orang-orang dalam posisi yang berbeda mengorbankan tujuan bersama perusahaan untuk mewujudkan kepentingan pribadi. Untuk memperkecil munculnya konflik keagenan maka diperlukan pengelolaan usaha (corporate governance) yang baik dan diharapkan mampu memperkecil jurang pemisah antara agen dan prinsipal. Menurut Setyawan (2013), dengan pengelolaan manajemen yang baik, maka kinerja keuangan diharapkan menjadi baik. Penerapan GCG akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang tercermin pada kinerja keuangan.

Pentingnya penerapan seluruh prinsip good corporate governance (GCG) dalam pengelolaan LPD memberikan dampak yang jelas bagi LPD untuk pengambilan keputusan secara bertanggungjawab. Maka dari itu penerapan dari GCG sangat berpengaruh untuk pengelola LPD sehingga menjadi lebih baik dalam meningkatkan kinerjanya (Dewi, 2014). Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti kembali tentang "Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja LPD Di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem".

2. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi, dan teori organisasi. Perspektif keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami corporate governance. Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agents. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agents untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984).

Rahayu (2010) menyatakan bahwa agency theory mengasumsikan semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Teori

keagenan berlaku dalam penelitian ini dilihat dari segi struktur organisasi dalam LPD, dengan pengurus LPD sebagai agent dan desa parakaman sebagai principal.

2.2 Hipotesis

2.1.1 Transparansi Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Rendang

Menurut pedoman umum good corporate governance Indonesia (2006), salah satu prinsip GCG adalah transparansi. Transparansi (Transparency) yaitu perusahaan harus menyediakan informasi relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Penelitian yang dilakukan Suwarmika, dkk (2019), menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD. Mahaendrayasa dan Dwija Putri (2017) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Rendang

2.1.2 Akuntabilitas Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Rendang

Menurut pedoman umum good corporate governance Indonesia (2006), salah satu prinsip GCG adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas (Accountability) yaitu perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bulandari dan Damayanti (2014), Dewi dan Dwijayanti (2014), Pradnyaswari dan Putri (2016) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

H₂ : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Rendang

2.1.3 Responsibilitas Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Rendang

Menurut pedoman umum good corporate governance Indonesia (2006), salah satu prinsip GCG adalah Responsibilitas. Responsibilitas (*Responsibility*) yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Penelitian yang dilakukan oleh Setyawan dan Putri (2013), Bulandari dan Damayanti (2014), Endiana (2019), Sandraningsih dan Dwija Putri (2015), Pradnyaswari dan Putri (2016) yang menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD).. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

H₃ : Responsibilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Rendang

2.1.4 Independensi Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Rendang

Menurut pedoman umum good corporate governance Indonesia (2006), salah satu prinsip GCG adalah Independensi. Independensi (*Independency*) yaitu untuk melancarkan pelaksanaan good corporate governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi intervensi oleh pihak lain. Penelitian yang dilakukan oleh Setyawan dan Putri (2013), Dewi dan Dwijayanti (2014), Bulandari dan Damayanti (2014), Sandraningsih dan Dwija Putri (2015) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis keempat yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H₄: Independensi berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Rendang

2.1.5 Kewajaran Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Rendang

Menurut pedoman umum good corporate governance Indonesia (2006), salah satu prinsip GCG adalah Kewajaran. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*) yaitu perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Penelitian yang dilakukan oleh Bulandari dan Damayanti (2014), Sandraningsih dan Dwija Putri (2015) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kelima yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

H₅: Kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Rendang

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem dengan menyebar kuesioner kepada setiap pegawai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan badan pengawas setiap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dijadikan sampel. Unit analisis dalam penelitian ini merupakan organisasi berupa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: variabel bebas (*independent variable*) yang terdiri dari transparansi (TR), akuntabilitas (AK), responsibilitas (RP), independensi (IN) dan kewajaran (KW); dan variabel terikat (*dependent variabel*) yaitu adalah kinerja LPD (KL).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil atau jawaban responden melalui kuesioner. Sedangkan data sekunder dalam

penelitian ini diperoleh melalui artikel ilmiah, jurnal, skripsi, dan penelitian – penelitian terdahulu.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem yang berjumlah 26 Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu (Sugiyono, 2017). Sehingga diperoleh Responden di masing-masing LPD terdiri dari 1 orang ketua LPD, 5 orang pegawai yang terkait dengan pembukuan, dan seluruh badan pengawas.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikoleniaritas, dan heteroskedastisitas), uji kelayakan model (uji *adjusted R²*, uji f, dan uji t), serta analisis regresi linear berganda dengan persamaan model sebagai berikut:

$$KL = \alpha + \beta_1 TR + \beta_2 AK + \beta_3 RP + \beta_4 IN + \beta_5 KW + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

KL : kinerja LPD	α : konstanta
β : koefisien regresi	TR : keterbukaan
AK : akuntabilitas	RP : pertanggung jawaban
IN : kemandirian	KW: kewajaran
e = error	

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif menerangkan bahwa jumlah kuesioner yang disebar yaitu sebanyak 168 kuesioner. Jumlah kuesioner yang kembali adalah 145 kuesioner dan 23 kuesioner yang tidak kembali, hal tersebut dikarenakan di beberapa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) terdapat kurang dari 5 pegawai yang terkait dengan pembukuan. Variabel Kinerja LPD (KL) memiliki nilai minimum sebesar 16,00 dan nilai maksimum sebesar 25,00 dengan nilai rata-rata sebesar 20,2069 serta standar deviasi sebesar 2,16313. Variabel Transparansi (TR) memiliki nilai minimum sebesar 8,00 dan nilai maksimum sebesar 15,00 dengan nilai rata-rata sebesar 12,7241 serta standar deviasi sebesar 1,64774. Variabel Akuntabilitas (AK) memiliki nilai minimum sebesar 10,00 dan nilai maksimum sebesar 15,00 dengan nilai rata-rata sebesar 12,9793 serta standar deviasi sebesar 1,40668. Variabel Responsibilitas (RP) memiliki nilai minimum sebesar 10,00 dan nilai maksimum sebesar 15,00 dengan nilai rata-rata sebesar 12,6759 serta standar deviasi sebesar 1,62824. Variabel Independensi (IN) memiliki nilai minimum sebesar 6,00 dan nilai maksimum sebesar 10,00 dengan nilai rata-rata sebesar 8,7241 serta standar deviasi sebesar 0,95367. Variabel Kewajaran (KW) memiliki nilai minimum sebesar 9,00 dan nilai maksimum sebesar 15,00 dengan nilai rata-rata sebesar 12,8414 serta standar deviasi sebesar 1,51692.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dapat dijelaskan bahwa nilai *Asymp.Sig* dari masing-masing variabel sebesar 0,687. Nilai *asymp.sig* tersebut lebih besar dari 0,05 maka dari itu dapat dinyatakan bahwa model regresi berdistribusi normal.

4.2.2 Uji Multikoleniaritas

Hasil uji multikolinieritas dapat dijelaskan bahwa nilai *tolerance* dari masing-masing variabel lebih dari 10% atau 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinieritas.

4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dijelaskan bahwa nilai signifikan dari masing – masing variabel lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa didalam model regresi tidak terjadi heterokedastisitas.

4.3 Analisis Linear Berganda

Hasil analisis linear berganda menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$KL = 4,121 + 0,143TR + 0,331AK + 0,264RP + 0,372IN + 0,262KW$$

Hasil uji analisis linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil Uji Analisis Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.121	1.236		3.334	.001		
	TR	.143	.119	.109	1.201	.232	.375	2.668
	AK	.331	.157	.215	2.113	.036	.299	3.348
	RP	.264	.123	.199	2.145	.034	.360	2.775
	IN	.372	.180	.164	2.069	.040	.494	2.025
	KW	.262	.127	.184	2.064	.041	.391	2.558

Sumber: Data diolah (2019)

4.4 Uji Kelayakan Model

4.4.1 Adjusted R²

Hasil uji koefisien determinasi (Adjusted R²) menunjukkan nilai sebesar 0,553 atau 55%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 55% variabel kinerja LPD dipengaruhi oleh variabel transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Sedangkan sisanya sebesar 45% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model regresi ini.

4.4.2 Uji F

Hasil uji f diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai α (0,05), maka model regresi linear berganda layak digunakan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	383.326	5	76.665	36.687	.000 ^a
	Residual	290.467	139	2.090		
	Total	673.793	144			

Sumber: Data diolah (2019)

4.4.3 Uji t

Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.121	1.236		3.334	.001
	TR	.143	.119	.109	1.201	.232
	AK	.331	.157	.215	2.113	.036
	RP	.264	.123	.199	2.145	.034
	IN	.372	.180	.164	2.069	.040
	KW	.262	.127	.184	2.064	.041

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

- 1) Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja LPD diperoleh nilai t positif sebesar 1,201 dengan tingkat signifikansi variabel transparansi sebesar 0,232 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa, sehingga H1 ditolak.
- 2) Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja LPD diperoleh nilai t positif sebesar 2,113 dengan tingkat signifikansi variabel akuntabilitas sebesar 0,036 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa, sehingga H2 diterima.
- 3) Pengaruh Responsibilitas terhadap Kinerja LPD diperoleh nilai t positif sebesar 2,145 dengan tingkat signifikansi variabel responsibilitas sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa, sehingga H3 diterima.
- 4) Pengaruh Independensi terhadap Kinerja LPD diperoleh nilai t positif sebesar 2,069 dengan tingkat signifikansi variabel independensi sebesar 0,040 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel independensi berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa, sehingga H4 diterima.
- 5) Pengaruh Kewajaran terhadap Kinerja LPD diperoleh nilai t positif sebesar 2,064 dengan tingkat signifikansi variabel kewajaran sebesar 0,041 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa, sehingga H5 diterima.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja LPD pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem

Transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD dan dapat disimpulkan bahwa H1 yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Rendang dinyatakan ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ketidak transparanan LPD dalam hal mengungkapkan informasinya, tidak mempengaruhi kepercayaan stakeholder dalam hal ini krama desa terhadap pengurus LPD. Hal tersebut disebabkan karena kinerja LPD sudah optimal, dapat dilihat dari pengurus Lembaga Perkreditan Desa dapat menyediakan laporan keuangan tepat waktu, memadai dan akurat

serta pengurus, badan pengawas, dan krama desa sebagai anggota secara periodik melakukan pertemuan untuk membahas perkembangan Lembaga Perkreditan Desa meskipun tidak transparan dalam hal penyajian informasi keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mahaendrayasa dan Dwija Putri (2017), serta Yasinta Putri dan Dwiana Putra (2017) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

4.5.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja LPD pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem

akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja LPD dan dapat disimpulkan bahwa H2 yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Rendang dinyatakan diterima. Hasil penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa semakin memahami visi dan misi Lembaga Perkreditan Desa serta tujuan dan target operasional Lembaga Perkreditan Desa maka operasional perusahaan semakin terarah sehingga kinerja Lembaga Perkreditan Desa akan semakin meningkat. Selain itu memahami peran, tugas serta tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kemampuannya dan laporan keuangan beserta bukti transaksi telah didokumentasikan dengan baik juga akan meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bulandari dan Damayanti (2014), Dewi dan Dwijayanti (2014) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

4.5.3 Pengaruh Responsibilitas terhadap Kinerja LPD pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem

Responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja LPD dan dapat disimpulkan bahwa H3 yang menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Rendang dinyatakan diterima. Hasil penelitian tersebut menunjukkan apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip responsibilitas yang berkaitan dengan pemahaman dan taat terhadap seluruh peraturan perundangan serta peraturan LPD yang berlaku maka kinerja Lembaga Perkreditan Desa akan semakin meningkat. Selain itu melaksanakan tanggung jawab kepada stakeholders serta peduli terhadap masyarakat atau krama desa dan kelestarian lingkungan juga akan meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Setyawan dan Putri (2013), Bulandari dan Damayanti (2014) yang menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

4.5.4 Pengaruh Independensi terhadap Kinerja LPD pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem

Independensi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD dan dapat disimpulkan bahwa H4 yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Rendang dinyatakan diterima. Hasil penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa penerapan prinsip independensi pada LPD sudah berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa jika dalam mengelola LPD pengurus LPD mengambil keputusan yang objektif (bebas dari kepentingan berbagai pihak) dan dapat menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun maka sikap tersebut dapat meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Setyawan dan Putri (2013), Dewi dan Dwijayanti (2014), Bulandari dan Damayanti (2014) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

4.5.5 Pengaruh Kewajaran terhadap Kinerja LPD pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem

Kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD dan dapat disimpulkan bahwa H5 yang menyatakan bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Rendang dinyatakan diterima. Hasil penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa penerapan prinsip kewajaran pada LPD sudah berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa jika dalam mengelola LPD pengurus LPD memberikan perlakuan yang adil, setara dan wajar bagi semua anggota serta memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan bagi krama desa maka kinerja Lembaga Perkreditan Desa akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bulandari dan Damayanti (2014) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

- 1) Transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem.
- 2) Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem.
- 3) Responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem.
- 4) Independensi berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem.
- 5) Kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu:

- 1) Banyaknya responden yang diperlukan dan kesibukan dari LPD ketika peneliti melakukan pengisian kuesioner menjadi tidak efisien dan kuesioner lama dikembalikan. Saran untuk peneliti selanjutnya agar melengkapi surat-surat yang diperlukan, supaya lebih cepat memperoleh izin penelitian maupun izin penyebaran kuesioner.
- 2) Penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas obyek penelitian untuk menyempurnakan dan melengkapi penelitian. Disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian, seperti mekanisme pemantauan GCG sehingga penelitian selanjutnya dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bulandari, I Gusti Agung Wita. 2015. Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung. Skripsi. Universitas Udaya.
- Dewi, Kadek Krismaya. 2014. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar Bali. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Universitas Udayana.
- Dwijaputri, Asri. 2014. Pengaruh Kebijakan Deviden pada Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan CSR dan Good Corporate Governance sebagai Pemoderasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Endiana, I. D. M. (2019). Implementasi Corporate Governance Pada Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 9(1), 92-100.
- Jensen, M.C, and C.H. Smith. 1984. The Modern Theory of Corporate. *Journal of Financial and Economics*.
- Pradnyaswari, Luh Gede Diah Ary. 2016. Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Keuangan Koperasi di Kabupaten Klungkung. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Rahayu, Sri. 2010. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibilities dan Good Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Sandraningsih, Ni Kadek Budi. 2016. Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

- Setyawan, Komang Meitradi. 2013. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Shill, N. C. 2008. Accounting for Good Corporate Governance. JOAAG.
- Suwarmika, I. K., Suryandari, N. N. A., & Susandya, A. P. G. B. A. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma), 1(1), 198-217.